LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 128/PMK.07/2018
TENTANG : TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK ROKOK SEBAGAI KONTRIBUSI DUKUNGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

A. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN
KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ANTARA
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG .....1)
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....2)
NOMOR .....3)
NOMOR: .....4)

Pada hari ini, ... 5) tanggal ..... 6) bulan ..... 7) tahun ..... 8) di .....9) telah dilaksanakan kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang .....10) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....11) atas kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Provinsi/Kab /Kota	Rencana Penerimaan Pajak Rokok (Rp) Tahun ....12)	Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan		Keterangan (Lebih/Sama/ Kurang dari 37,5%)
		Anggaran (Rp)	Wajib 37,5% dari (b)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
..... 13)	Rp ..... 14)	Rp ..... 15)	Rp ..... 16)	..... 17)

Terhadap selisih kurang rencana atas anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat Pajak Rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota ..... 18) dipotong oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar selisih kurang tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 19)

Gubernur/Bupati/
Walikota ..... 20)

Materai
Rp6.000

..... 22)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang ..... 21)

Materai
Rp6.000

..... 23)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Keterangan
1)	Diisi nama Kantor cabang BPJS Kesehatan
2)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
3)	Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
4)	Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota
5)	Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi
6)	Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
7)	Diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
8)	Diisi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
9)	Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi
10)	Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan
11)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
12)	Diisi tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok
13)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
14)	Diisi jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan
15)	Diisi jumlah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan, termasuk dalam hal terdapat selisih kurang tahun sebelumnya
16)	Diisi jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah sebesar 37,5% dari rencana Penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan
17)	Diisi (Lebih/Sama/Kurang dari 37,5%)
18)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
19)	Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi
20)	Diisi nama daerah gubernur/bupati/walikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/ walikota
21)	Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
22)	Diisi nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
23)	Diisi nama Kepala cabang BPJS Kesehatan

B. FORMAT KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN

KOMPILASI BERITA ACARA KESEPAKATAN
KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
PEMERINTAH PROVINSI .....1)
NOMOR .....2)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah kami, berikut:

No.	Provinsi/Kab /Kota	Rencana Penerimaan Pajak Rokok (Rp) Tahun ....3)	Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan		Selisih Kurang (Rp)
			Anggaran (Rp)	Wajib 37,5% dari (c)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (e)-(d)
1.	..... 4)	Rp ..... 5)	Rp ..... 6)	Rp ..... 7)	Rp ..... 8)
2.	.....	Rp	Rp	Rp	Rp .....
3.	..... dst	Rp	Rp	Rp	Rp .....
Jumlah		Rp	Rp	Rp	Rp .....

Rincian Berita Acara Kesepakatan Provinsi/Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kompilasi Berita Acara Kesepakatan ini.

Terhadap selisih kurang Rencana atas anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat Pajak Rokok yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota .....9) dipotong oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar selisih kurang tersebut.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 19)

Gubernur ..... 11)

Materai
Rp6.000

..... 13)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang ..... 12)

Materai
Rp6.000

..... 14)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Keterangan
1	Diisi nama provinsi
2	Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota
3	Diisi tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok
4	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
5	Diisi jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan
6	Diisi jumlah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan
7	Diisi jumlah kewajiban pemenuhan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah sebesar 37,5% dari rencana Penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan
8	Diisi Jumlah selisih kurang antara Wajib 37,5% dengan Anggaran
9	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
10	Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi
11	Diisi nama daerah gubernur atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur
12	Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
13	Diisi nama gubernur atau pejabat yang ditunjuk
14	Diisi nama Kepala cabang BPJS Kesehatan

C. FORMAT REKONSILIASI

REKONSILIASI
KONTRIBUSI DAERAH UNTUK MENDUKUNG
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN ANTARA
BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG .....1)
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....2)
NOMOR .....3)
NOMOR: .....4)

Pada hari ini, ...5) tanggal .....6) bulan .....7) tahun ..... 8) di .....9) telah dilaksanakan kesepakatan Kontribusi Daerah untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang .....10) dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota .....11) atas kewajiban pembayaran Jaminan Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data/bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Provinsi/ Kab/Kota	Rencana Penerimaan Pajak Rokok (Rp) Tahun ....12)		Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan		Selisih Lebih/Kurang
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
..... 13)	Rp ..... 14)	Rp ..... 15)	Rp ..... 16)	Rp ..... 17)	Rp ..... 18)

Terhadap selisih kurang rencana atas anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, kami sepakat untuk diperhitungkan dalam berita acara kesepakatan tahun berikutnya.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 19)

Gubernur/Bupati/
Walikota ..... 20)

Materai
Rp6.000

..... 22)

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang ..... 21)

Materai
Rp6.000

..... 23)

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Keterangan
1)	Diisi nama Kantor cabang BPJS Kesehatan
2)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
3)	Diisi nomor persuratan Kantor Cabang BPJS
4)	Diisi nomor persuratan provinsi/kabupaten/kota
5)	Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi
6)	Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
7)	Diisi bulan pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
8)	Diisi tahun pada saat dilaksanakannya rekonsiliasi dan ditulis dalam huruf
9)	Diisi nama daerah tempat dilaksanakannya rekonsiliasi
10)	Diisi nama Kantor Cabang BPJS Kesehatan
11)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
12)	Diisi tahun periode rencana penerimaan Pajak Rokok
13)	Diisi nama provinsi/kabupaten/kota
14)	Diisi jumlah rencana penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan
15)	Diisi jumlah Realisasi penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan
16)	Diisi jumlah anggaran Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan
17)	Diisi jumlah realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan
18)	Diisi Jumlah selisih lebih/kurang antara jumlah Realisasi penerimaan Pajak Rokok pada tahun bersangkutan dengan jumlah realisasi Jaminan Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada tahun bersangkutan
19)	Diisi nama tempat, tanggal bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi
20)	Diisi nama daerah gubernur/bupati/walikota atau nama jabatan yang ditunjuk oleh gubernur/bupati/walikota
21)	Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
22)	Diisi nama gubernur/bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk
23)	Diisi nama Kepala cabang BPJS Kesehatan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001